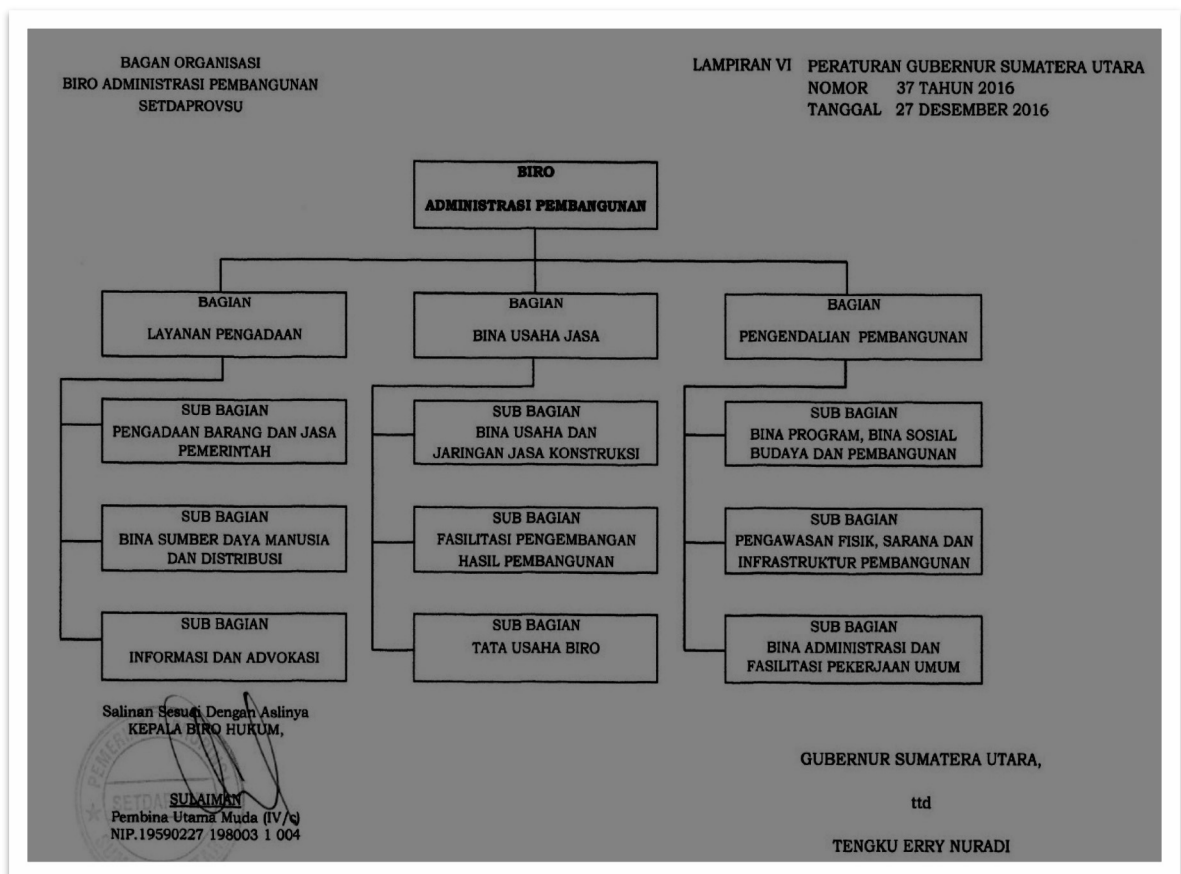


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provsu, bahwa Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

- 1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu SekdaprovSU menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, layanan pengadaan dan pengendalian pembangunan serta bina usaha jasa.
- 2) Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, kebijakan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaporan pembangunan, serta pembinaan usaha jasa;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provsu, maka telah diperoleh draft Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sebagai berikut:

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, kebijakan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaporan pembangunan serta pembinaan usaha jasa;
2. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu berpegang pada budaya kerja seperti:

1. Mengutamakan profesionalisme, ketelitian, kecermatan, kearifan dan objektivitas dalam bekerja;
2. Mengutamakan disiplin dan waktu;
3. Berusaha bekerja dalam satuan Tim secara efisien, produktif, adaptif dan inovatif;
4. Berorientasi kepada hasil kerja yang prima;
5. Hemat dalam penggunaan dana, sarana dan prasarana;
6. Siap bekerja secara berkualitas.

Untuk menggambarkan identitas masa depan yang didambakan, maka dirumuskan visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan 2013-2018 sebagai berikut:

1. Visi Biro Administrasi Pembangunan adalah "Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel"
2. Misi Biro Administrasi Pembangunan adalah :
 - a. Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel dan Transparan melalui koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
 - b. Mewujudkan Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan

pembangunan dan menginformasikan serta mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah di dalam maupun luar negeri sebagai upaya pembinaannya.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan dan Hasil-Hasil Pembangunan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
2. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pada point 1 tersebut di atas adalah mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran:

- 1.1. Terkoordinirnya dan Terefasilitasinya Instansi terkait PemprovSU dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri
- 1.2. Terhimpun dan Terevaluasinya Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan APBD ProvSU
- 2.1 Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD ProvSU

2.2 Terlaksananya proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antara lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dengan Indikator Sasaran:

1.1.1. Terkoordinirnya Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mengikuti pelaksanaan Pameran di dalam maupun di luar negeri yang meliputi Pameran, Hasil Pembangunan, Industri, Perdagangan, Kerajinan, Pariwisata, Budaya, Pertanian/Agro serta Potensi Investasi.

1.1.2. Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan

2.1.1. Adanya peningkatan pemahaman jasa penyedia Barang/Jasa.

2.1.2. Adanya kelancaran pelaksanaan proses tender pada Dinas/Instansi Pemprov.

3.2.1. Adanya operasional Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Sumatera Utara

3.2.2. Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi kepada efisien dan efektifitas.
- b. Mendorong timbulnya prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pola partisipasi dan berkelanjutan.
- c. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut.

Sementara itu, sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan yang dikelola terdiri dari:

1. Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait PemprovSU dan Mitra Binaannya dalam mengikuti Pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi Daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri;
2. Terlaksananya tertib administrasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD ProvSU;
3. Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD ProvSU;

4. Terlaksananya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu dan Penginputan e-SSH;
5. Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui operasional LPSE Provsu.

Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sesuai dengan Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- g. Program Peningkatan Kapasitas Informasi Publik

Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Biro Administrasi Pembangunan dibantu:

- a. Bagian Layanan Pengadaan
 - a.1. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- a.2. Sub Bagian Bina Sumber Daya Manusia dan Distribusi
- a.3. Sub Bagian Informasi dan Advokasi

- b. Bagian Bina Usaha Jasa
 - b.1. Sub Bagian Bina Usaha Jasa dan Jaringan Jasa Konstruksi
 - b.2. Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Hasil Pembangunan
 - b.3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- c. Bagian Pengendalian Pembangunan
 - c.1. Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan.
 - c.2. Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan.
 - c.3. Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitasi Pekerjaan Umum.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, menyelenggarakan program pemerintah dalam bidang penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala

Daerah dalam hal pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, kebijakan, layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan pelaporan pembangunan, serta pembinaan usaha jasa.

Selain dari pada itu, penyusunan Renja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU yang menjadi salah satu unsur Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara juga mempertimbangkan rencana pembangunan berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yang menjadi prioritas pembangunan dalam hal pengendalian urusan pemerintahan dan kewenangan otonomi Provinsi dibidang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Bina Usaha Jasa dan Pengendalian Pembangunan

B. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Renja SKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

- 1959);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5209);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22).
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provsu.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Biro Administrai Pembangunan Setdaprovsu adalah untuk memberikan arah dan pedoman pemerintahan dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan jangka menengah, khususnya mengenai pengadministrasian layanan pengadaan barang dan jasa, bina usaha jasa dan pengendalian pembangunan.

Kaitan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan Renja SKPD Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu adalah untuk mewujudkan visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dalam bidang pembangunan khususnya administrasi pembangunan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penyusunan Renja SKPD Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dari penyusunan renja SKPD Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD N-2

Bab ini menguraikan evaluasi dan hasil-hasil yang dicapai pada proram dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu pada Tahun Anggaran 2017 (n-2)

BAB III: TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran dan program dan kegiatan Biro Administrasi Setdaprovsu TA. 2019.

BAB IV: PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

1. Program dan Kegiatan TA. 2017

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud, maka sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan yang dikelola pada tahun 2017 terdiri dari:

- Terkoordinirnya dan Terasilitasinya Instansi terkait Pemprovsu dan Mitra Binaannya dalam mengikuti Pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi Daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri;*
- Terlaksananya tertib administrasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provsu;*
- Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu;*
- Terlaksananya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu dan Penginputan e-SSH;*
- Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.*

Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov su sesuai dengan Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.*

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

A. Penetapan Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Volume	Satuan
1	Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri.	<p>Terinformasikannya hasil-hasil pembangunan dan potensi Sumatera Utara di dalam dan luar negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait untuk mengikuti pameran tentang hasil-hasil pembangunan dan potensi Sumut di dalam dan luar negeri - Jumlah SKPD/ Instansi dan mitra binaan (peserta) dalam setahun yang difasilitasi untuk mengikuti seluruh pameran tentang hasil-hasil pembangunan dan potensi Sumut di dalam dan luar negeri 	14	Pameran
			160	peserta

2	Terlaksananya tertib administrasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	Terhimpun dan Terevaluasinya laporan bulanan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu: - Jumlah buku laporan - Frekuensi Pelaporan	3 12	Buku Kali
3	Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu: - Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan APBD Provsu pada UPT	25 8	Kab Kota
4	Terlaksananya tertib administrasi penyusunan DPA SKPD dan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	Terwujudnya tertib administrasi penyusunan dan penyampaian DPA dan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu - Jumlah SKPD yang menyampaikan DPA tepat waktu	49	SKPD

NO	Program	APBD TA. 2017 (Rupiah)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	613.985.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27.000.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	611.800.000
4.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	290.800.000

	Kinerja dan Keuangan	
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.078.397.250
6.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.610.330.000
	JUMLAH	8.232.312.250

Berkaitan dengan Rapat Kerja Komisi D DPRD Provsu dengan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu telah diagendakan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang P. APBD Provsu TA. 2017, maka dapat kami sampaikan bahwa Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2017 berjumlah Rp.8.236.462.250 (delapan milyar duaratus tigapuluh enam juta empat ratus enampuluh dua ribu duaratus lima puluh rupiah), terdiri dari:

- Belanja Pegawai Rp.1.238.640.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp.6.847.822.250,-
- Belanja Modal Rp.150.000.000,-

Selanjutnya sehubungan dengan P. APBD 2017, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu tidak melakukan penambahan atau pengurangan anggaran, jumlah total anggaran tetap sejumlah Rp.8.236.462.250 (delapan milyar duaratus tigapuluh enam juta empat ratus enampuluh dua ribu duaratus lima puluh rupiah), Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu hanya

melakukan usulan pergeseran dana anggaran sesuai dengan Nota usulan kami kepada Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 1009/BAP-III/ 2017 tanggal 5 September 2017, tembusan disampaikan ke Kepala Bappeda Provsu, dan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

Pergeseran Anggaran pada P. APBD 2017 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu Tahun 2017 tertera sebagaimana tabel berikut ini:

**USULAN PERGESERAN KEGIATAN APBD PROVSU TA. 2017
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	DANA	DANA P. APBD 2017	
		APBD SU 2017	PERGESERAN	MENJADI
I	PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN			
1	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	206.640.000	-	206.640.000
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000	20.000.000	35.000.000
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	40.000.000
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000	5.000.000	20.000.000
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	225.000.000	88.345.000	313.345.000
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
6	Penyelenggaraan Informasi Elektronik melalui Website Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu	27.000.000	-	27.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
7	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN	100.000.000	-	100.000.000
8	Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)	511.800.000	-	511.800.000

IV	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
9	Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu	173.800.000	-	173.800.000
10	Pengkoordiniran dan Pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provsu	117.000.000	-	117.000.000
V	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
11	Fasilitasi ULP dengan Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa	4.466.497.250	(1.038.000.000)	3.428.497.250
VI	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH			
12	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsum beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsum mengikuti Pekan Raya Sum. Utara	314.315.000	-	314.315.000
13	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsum beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsum mengikuti Pesta Pulau Penang	406.550.000	200.000.000	606.550.000
14	Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsum dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsum di dalam dan Luar Negeri	450.000.000	100.000.000	550.000.000
15	Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait Pemprovsum beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsum mengikuti Pekan Raya Jakarta	359.050.000	-	359.050.000

16	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Pembangunan pada SKPD dan Kab/Kota/UPT di Lingkungan Provsu	301.660.000	195.505.000	497.165.000
17	Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara	90.250.000	209.750.000	300.000.000
18	Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provsu	82.400.000	149.400.000	231.800.000
19	Pemberdayaan Tim Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Kab/ Kota Se-Sumatera Utara	147.400.000	50.000.000	197.400.000
20	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	207.100.000	-	207.100.000
TOTAL JUMLAH		8.236.462.250	-	8.236.462.250

Pergeseran dana anggaran ini telah diusulkan mengingat dengan semakin meningkatnya aktifitas Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dalam melaksanakan tupoksi dan perubahan sistem penganggaran dengan diberlakukannya *e-planning* dan *e-budgeting* di Tahun Anggaran 2018, maka untuk menunjang pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan berbagai hal termasuk penerapan aplikasi Satuan Standar Harga (*e-SSH*) tahun 2018, dimana Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu bagian dari Tim Penyusunan *e-SSH*.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, telah dilakukan kegiatan untuk menunjang hal dimaksud, berupa kegiatan studi banding *e-SSH*, Sosialisasi Juknis dan hal-hal lainnya menyangkut bidang tugas Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

B. Capaian Kinerja

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU berdasarkan Perjanjian Kinerja masing-masing SKPD Tahun 2017, maka program/kegiatan strategis Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU Tahun Anggaran 2017 yang telah terjadwal dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI	
			Vo.	Satuan	Vol.	Satuan
1	Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait PemprovSU dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri.	Terinformasikannya hasil-hasil pembangunan dan potensi Sumatera Utara di dalam dan luar negeri: - Frekuensi pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/instansi terkait untuk mengikuti pameran tentang hasil-hasil pembangunan dan potensi Sumut di dalam dan luar negeri	14	Pameran	12	Pameran
		- Jumlah SKPD/ Instansi dan mitra binaan (peserta) dalam setahun yang difasilitasi untuk mengikuti seluruh pameran tentang hasil-hasil pembangunan dan potensi Sumut di dalam	160	peserta	150	peserta

		dan luar negeri				
2	Terlaksananya tertib administrasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	Terhimpun dan Terevaluasinya laporan bulanan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu: - Jumlah buku laporan - Frekuensi Pelaporan	3 12	Buku Kali	3 12	Buku Kali
3	Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu: - Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan APBD Provsu pada UPT	25 8	Kab Kota	18 7	Kab Kota
4	Terlaksananya tertib administrasi penyusunan DPA SKPD dan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu	Terwujudnya tertib administrasi penyusunan dan penyampaian DPA dan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu - Jumlah SKPD yang menyampaikan DPA tepat waktu	49	SKPD	49	SKPD

Tabel. Capaian Kinerja Strategis

Program	Kegiatan	Capaian Volume Kegiatan	Permasalahan	Solusi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan	1 Kali Pameran	Kondisi gedung Paviliun Pemprovsu kurang baik karena beberapa plafon ada yang rusak begitu juga dengan partisinay sudah	Perlu adanya perbaikan plafon sehingga gedung Paviliun Pemprovsu lebih kondusif dan layak

Fasilitasi Paviliun Pemprovsum mengikuti Pekan Raya Sum. Utara		kurang layak.	dipergunakan untuk promosi
Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsum beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsum mengikuti Pesta P.Pinang/Malaysia	1 kali pameran	Persiapan kurang maksimal, kondisi sarana interior Paviliun perlu dibenahi dan diremajakan, selain itu tahun ini partisipasi yang mengisi paviliun masih rendah	Ditahun mendatang dapat ditingkatkan dan anggarannya pada APBD
Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsum dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsum didalam dan Luar Negeri	9 pameran	Belum maksimalnya hasil atau potensi Sumatera Utara yang dapat diinformasikan, mengingat kegiatan ini belum dapat diikuti oleh beberapa Instansi yang seharusnya dapat/ layak untuk mengikutinya	Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi dilingkungan Pemprovsum tentang Keikutsertaan dalam Kegiatan-kegiatan ini
Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu	1 TA 3 Buku PerBulan	1. Penyampaian Laporan bulanan selalu terlambat, diakibatkan pengelola kegiatan tidak tepat waktu menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan APBD Provsu setiap bulannya 2. Tidak adanya sanksi kepada SKPD yang terlambat dan	Perlu ditingkatkan fasilitas sistem pelaporan bulanan dengan menggunakan sistem pelaporan berbasis Informasi dan Teknologi (IT) sehingga koordinasi dapat terlaksanakan dengan cepat dan transparans.

			tidak menyampaikan Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu	
	Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Jakarta	1 Kali Pameran	Bahan/ Barang Pameran yang ditampilkan dalam stand terlalu padat, sehingga mengurangi keindahan stand dan kerapian penampilan stand	<p>- Perlu dilakukan penambahan luas stand</p> <p>- Perlu dilakukan pengaturan jumlah bahan/barang pameran sehingga ideal untuk ditampilkan.</p>
	Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara	1 TA 18 Kab/7 Kota	Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, karena keterbatasan dana maka masih belum menjangkau seluruh satuan kerja pemakai dana APBD Provsu, yang mengakibatkan tidak semua permasalahan dan pelaksanaan kegiatan yang ditampung dapat	Perlu penambahan penganggaran untuk kegiatan, agar seluruh SKPD pemakai dana APBD Provsu dapat dipantau dan dimonitoring.

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2014, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mempunyai anggaran APBD sebesar Rp.2.512.591.950,- terdiri dari 2 Program, yaitu Program Administrasi Perkantoran sebesar Rp.227.040.000,- dan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.285.551.950,- .Sementara pada Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 besaran anggaran realisasi sesuai dengan tabel berikut:

Tabel Anggaran Biro TA. 2014

NO	Program	APBD TA. 2014 (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Program Administrasi Perkantoran	227.040.000,-	210.355.950,-
2	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.285.551.950,-	2.136.288.200,-
	JUMLAH	2.512.591.950,-	2.346.644.200,-

Tabel Anggaran Biro TA. 2015

NO	Program	APBD TA. 2015 (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1	Program Administrasi Perkantoran	218.760.000,-	184.607.550,-	84,4%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.991.792.000,-	1.655.174.180,-	83,1%
	JUMLAH	2.210.552.000,-	1.839.781.730,-	83,2%

Tabel Anggaran Biro TA. 2016

NO	Program	APBD TA. 2015 (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1	Program Administrasi Perkantoran	214.680.000	208.992.050	97,40
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.985.320.000	1.784.888.478	89,90
	JUMLAH	2.200.000.000	1.996.797.481	91,87

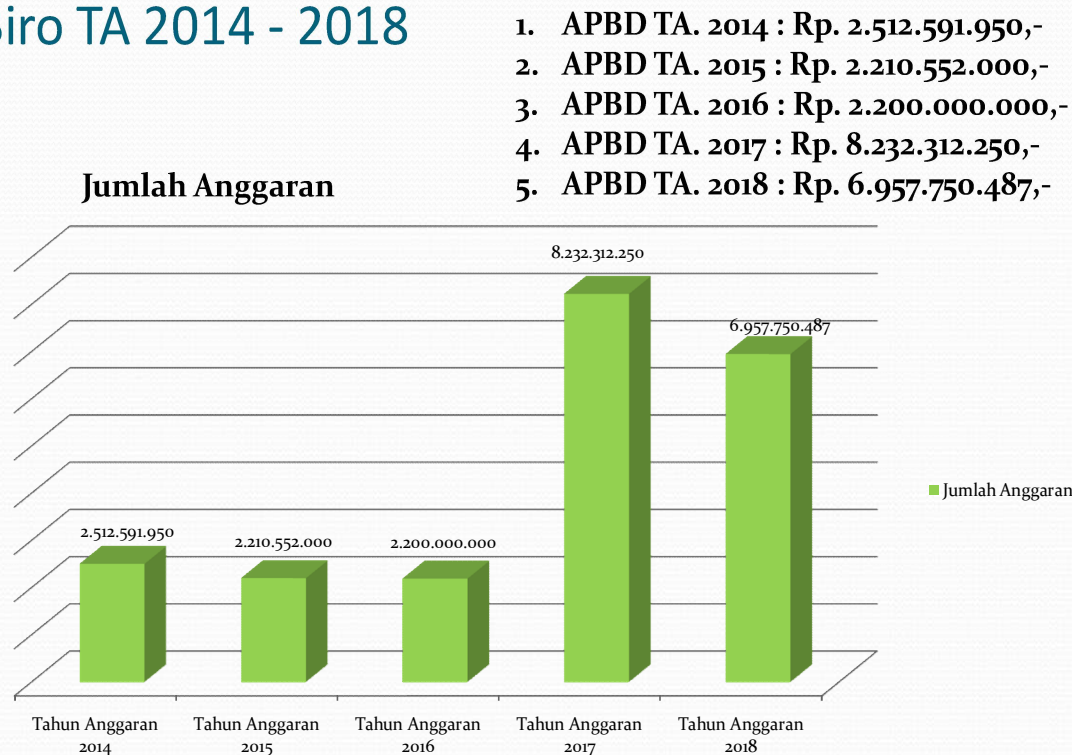
Tabel Anggaran Biro TA. 2017

NO	Program	APBD TA. 2017 (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	613.985.000	381.274.350	62,09
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	27.000.000	26.696.500	98,87
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	611.800.000	535.360.710	87,50
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	290.800.000	221.678.100	76,23
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.078.397.250	2.597.777.126	84,39
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.610.330.000	2.849.068.628	79,01
	JUMLAH	8.232.312.250	6.611.855.414	80,31

GRAFIK ANGGARAN

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU 2014 - 2018

Tabel 1. Ilustrasi Grafik Perbandingan Anggaran Biro TA 2014 - 2018



1. APBD TA. 2014 : Rp. 2.512.591.950,-
2. APBD TA. 2015 : Rp. 2.210.552.000,-
3. APBD TA. 2016 : Rp. 2.200.000.000,-
4. APBD TA. 2017 : Rp. 8.232.312.250,-
5. APBD TA. 2018 : Rp. 6.957.750.487,-

D. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran serta Kegiatan

Berikut indikator kinerja program/kegiatan Tahun Anggaran 2017 pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbantunya kelancaran tugas administrasi dan Keuangan	
	1.1. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/ Keuangan	Honorarium bagi PNS pengelola keuangan dan pengelola barang/ jasa	Aparatur Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu

	1.2. Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	Aparatur Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu
	1.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Aparatur Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu
	1.4. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum bagi pegawai peserta rapat	Aparatur Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu
	1.5. Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Biaya perjalanan dinas bagi aparatur di lingkungan Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu	Aparatur Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu
No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Informasi Elektronik	
	2.1. Penyelenggaraan Informasi Elektronik melalui Website Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu	Terpenuhinya Amanat Gubsu No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprovsu	SKPD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Membantu meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	3.1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN	Terdidik dan Terlatihnya Pejabat/ASN pada Pemprovsu	Aparatur Biro Adm PembangunanSetdaprovsu
	3.2. Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Tersosialisasikannya ULP	SKPD/Pemprovsu
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Tertatanya Sistem Pelaporan Capaian	

	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja dan Keuangan	
	4.1. Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu	Tersedianya Buku Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu	SKPD
	4.2. Pengkoordiniran dan Pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provsu	Terdatanya Hasil Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan Kab/Kota di TEPRA-UKP4	SKPD/ Pemerintah Kab/Kota
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terfasilitasinya Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Pemprov	
	5.1. Fasilitasi ULP Dengan Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa	Memfasilitasi ULP pada Pelelangan Barang/Jasa Pemerintah	SKPD/Pemprov
No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
6.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya capaian kegiatan untuk peningkatan kelembagaan Pemerintah Daerah	
	6.1. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara	Terkoordinirnya SKPD terkait serta mitra binaannya dalam mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara	SKPD

	<p>6.2. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Pavilun Pemprovsu mengikuti Pesta P.PinangMalaysia</p>	<p>Terkoordinirnya SKPD terkait serta mitra binaannya dalam mengikuti Pesta Pulau Pinang</p>	<p>SKPD</p>
	<p>6.3. Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsu dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsu di Dalam dan Luar Negeri</p>	<p>Terikutinya Expo dan Gelar Produk Kerajinan di dalam dan luar negeri oleh Dekranasda dan Mitra binaanya</p>	<p>SKPD</p>
	<p>6.4. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Pavilun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Jakarta</p>	<p>Terkoordinirnya SKPD terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Pekan Raya Jakarta</p>	<p>SKPD</p>
	<p>6.5. Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Pembangunan pada SKPD dan Kab/Kota/UPT Provsu</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan APBD lebih efektif efisien, tepat mutu dan sasaran.</p>	<p>SKPD</p>
	<p>6.6 Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provsu</p>	<p>Tertatanya petunjuk pelaksanaan kegiatan APBD sehingga mempunyai kesamaan bentuk dan acuan setiap Tahun Anggaran.</p>	<p>SKPD</p>

	6.7 Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provsu	Terciptanya lingkungan kondusif yang dapat mendukung terciptanya PPSP melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi	SKPD
	6.8 Pemberdayaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	Meningkatkan pemahaman para Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	Aparatur SKPD
	6.9 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah	Meningkatkan pemahaman para PNS/Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah	Aparatur SKPD

Pada Renja Tahun Anggaran 2017 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu mengusulkan 6 (enam) program dengan 30 (tiga puluh) kegiatan dengan Pagu Rp. 9.552.705.000,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah), berikut ini perbandingan Renstra Renstra 2014-2018 program kegiatan dengan usulan Renja 2017 :

RENSTRA 2014-2018	RENJA 2017
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2. Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja

<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Makanan dan Minuman 7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 	<p>(PK) Biro Adm. Pembangunan Sedaprovsu</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Biro Adm. Pembangunan Setdaporvsu 4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu 5. Penyelenggaraan Tata Usaha Perkantoran, Kerarsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi 6. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Belanja Surat Kabar dan Majalah 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 	
<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Pavilun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara 2. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Pavilun Pemprovsu mengikuti Pesta P.Pinang-Malaysia 3. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Pavilun Pemprovsu mengikuti 	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan informasi elektronik melalui Website Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu <p>Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Outbound PNS Biro 2. Pembinaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID)

<p>Sumatera Expo di Batam</p>	<p>Pembantu) Biro Adm. Pembangunan SetdaprovSU 3. Pembinaan Tim Pejabat Unit Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (UP4) Biro Adm. Pembangunan SetdaprovSU</p>
<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dukungan dan Fasilitas kepada Dekranasda dan Instansi Terkait PemprovSU dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand PemprovSU di Dalam dan Luar Negeri 5. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Paviliun PemprovSU mengikuti Pekan Raya Jakarta 6. Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Kegiatan APBD ProvSU 7. Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD ProvSU dan APBD Kab/Kota (TEPPA-UKP4) se-Sumatera Utara 8. Operasional Gedung Wisma Promosi Center Sumut di P. Pinang/Malaysia 9. Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD ProvSU 10. Sosialisasi Pengendalian dan 	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan Teknis PNS 2. Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan <p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan Evaluasi pelaksanaan pelaporan bulanan kegiatan APBD ProvSU 2. Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD ProvSU dan APBD Kab/Kota Se-Sumatera Utara serta Monev Sismontep TEPPA Provinsi Sumatera Utara 3. Kegiatan ULP dengan Pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa <p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta

<p>Pelaksanaan Pembangunan Provsu</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Biaya Internet Connection untuk LPSE Provinsi Sumatera Utara 12. Fasilitas Penyusunan RKA Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara 13. Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada SKPD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 14. Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada SKPD di Lingkungan Pemprov 15. Sosialisasi Penyusunan RKA bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sum.Utara 16. Monitoring dan pelaporan tindak lanjut hasil evaluasi APBD Kab/Kota 17. Pengendalian Kegiatan APBD Provsu Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara 18. Pemberdayaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara 19. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah 20. Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Regional Sumatera Utara 	<p>Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Pavilun Pemprov mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Pavilun Pemprov mengikuti Pesta P.Pinang-Malaysia 3. Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprov dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprov di Dalam dan Luar Negeri 4. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Pavilun Pemprov mengikuti Pekan Raya Jakarta 5. Operasional Gedung Wisma Promosi Center Sumut di P. Pinang/Malaysia 6. Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provsu 7. Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada SKPD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
---	--

21. Sosialisasi Monev Online bagi SKPD di Sumatera Utara	8. Pemberdayaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara
22. Rapat Koordinasi Tim Pengelola LPSE se Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara	9. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Sumatera Utara	10. Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provsu

APBD Tahun Anggaran 2017 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu untuk Belanja Langsung memperoleh Rp. 8.236.462.250,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari Renja TA. 2017 yang diusulkan sebesar Rp. 9.552.705.000,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Pada P. APBD Tahun Anggaran 2017 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu untuk Belanja Langsung tidak ada penambahan anggaran, hanya ada pergeseran anggaran dari beberapa kegiatan saja.

Adapun capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan TA. 2017 Triwulan IV adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	(%)
		(Rp)	(Rp)	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	613.985.000	381.274.350	62.10
1.1	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	206.640.000	138.825.000	67.18
1.2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000	28.433.250	81.24

1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.000.000	31.225.000	80.06
1.4	Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	4.997.500	25.00
1.5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah	313.345.000	177.793.600	56.74
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	27.000.000	26.696.500	98.88
2.1	Penyelenggaraan Informasi Elektronik melalui Website Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu	27.000.000	26.696.500	98.88
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	611.800.000	535.360.710	87.51
3.1	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis ASN	100.000.000	44.557.010	44.56
3.2	Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)	511.800.000	490.803.700	95.90
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	290.800.000	221.678.100	76.23
4.1	Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD ProvSU	173.800.000	144.847.600	83.34
4.2	Pengkoordiniran dan Pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) ProvSU	117.000.000	76.830.500	65.67
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.078.397.250	2.597.777.126	84.39
5.1	Fasilitasi ULP Dengan Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa	3.078.397.250	2.597.777.126	84.39
6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.610.330.000	2.885.057.728	79.91
6.1	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti Pekan Raya Sum. Utara	314.315.000	297.698.565	94.71
6.2	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti Pesta Pulau Penang	756.650.000	689.336.044	91.10
6.3	Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait PemprovSU dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand PemprovSU di dalam dan Luar Negeri	750.000.000	615.805.980	82.11
6.4	Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti	359.050.000	346.635.465	96.54

	Pekn Raya Jakarta			
6.5	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Pembangunan pada SKPD dan Kab/Kota/UPT di Lingkungan Provsu	497.165.000	272.843.750	54.88
6.6	Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara	296.850.000	263.292.920	88.70
6.7	Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provsu	231.800.000	122.995.700	53.06
6.8	Pemberdayaan Tim Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Kab/ Kota Se-Sumatera Utara	197.400.000	88.479.604	44.82
6.9	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	207.100.000	187.969.700	90.76
TOTAL.....		8.232.312.250	6.647.844.514	80.75

E. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI

Isu-Isu Strategis berdasarkan tupoksi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sebagai berikut :

- 1. Adanya berbagai kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah pelaksana Pembangunan*
- 2. Tersedianya sarana dan prasarana dalam rangka menginformasikan pelaksanaan pembangunan dan hasil pembangunan melalui expo, pameran dan sebagainya*
- 3. Adanya kemauan menjalin kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah dengan lembaga-lembaga non pemerintah pelaksana pembangunan.*
- 4. Semakin meningkatnya pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan penggunaan anggaran pembangunan.*
- 5. Meningkatnya persaingan dalam kalangan dunia usaha.*

6. Semakin banyaknya penyedia terdaftar dan dan terferivikasi dalam unit layanan pengadaan
7. Semakin meningkatnya pengawasan dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

F. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan RENSTRA 2014-2018 Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dan Hasil Evaluasi serta Proyeksi 5 tahun ke depan (2019-2023), dapat kembali di review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap RKPD Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, sebagai berikut :

NO	PROGRA M	EVALUASI HASIL KERJA 5 TAHUN (RPJMD 2014-2018)					PROYEKSI/PERKIRAAN 5 Tahun Kedepan (2019-2023)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	6 Pameran dalam negeri dan 2 luar negeri	6 Pameran dalam negeri dan 2 luar negeri	7 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	8 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	8 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	8 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	9 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	10 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	11 Pameran dalam negeri dan 3 luar negeri	12 Pameran dalam negeri dan 4 luar negeri
		Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota	Terevaluasinya pelaksanaan kegiatan APBD Provsu pada 11 Kab 7 Kota
		Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna	Terbinanya dan terkendalikannya kegiatan pembanguna

	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun	n yang bersumber dari dana APBD Provsu pada Balai, UPT dan UPRPJJ di Kab/Kota serta Bantuan Dana APBD Provsu yang diberikan kepada Kab/Kota selama 1 (satu) Tahun
	Teroperasionalkannya Wisma Promosi	Teroperasionalkannya Wisma Promosi	Teroperasionalkannya Wisma Promosi	Wisma Promosi Sum. Utara di	Wisma Promosi Sum. Utara di	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/	Wisma Promosi Sum. Utara di P.Pinang/

	Sum. Utara di P.Pinang/Mal aysia selama 1 (satu) Tahun	Sum. Utara di P.Pinang/Ma laysia selama 1 (satu) Tahun	Sum. Utara di P.Pinang/Ma laysia selama 1 (satu) Tahun	P.Pinang/Ma laysia diserahterim akan ke Pemko Medan	P.Pinang/Ma laysia diserahterim akan ke Pemko Medan	Malaysia diserahterim akan ke Pemko Medan	Malaysia diserahterim akan ke Pemko Medan	Malaysia diserahterim akan ke Pemko Medan	Malaysia diserahterim akan ke Pemko Medan	Malaysia diserahterim akan ke Pemko Medan
	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2014	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2015	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2016	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2017	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2018	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA. 2019	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2020	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2021	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2022	Terbuatnya buku Peraturan Gubsu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu TA.2023

		Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UPT /PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada : Tim Pembina Jasa Konstruksi, UPRPJJ/UP T/PSDA se Sumatera Utara
		Terhubungnya Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera	Terhubungnya Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara	Koneksi Internet LPSE Prov. Sumatera Utara

		Utara	Utara	diambil alih Dinas Kominfo	diambil alih Dinas Kominfo	diambil alih Dinas Kominfo	diambil alih Dinas Kominfo	diambil alih Dinas Kominfo	diambil alih Dinas Kominfo	diambil alih Dinas Kominfo	diambil alih Dinas Kominfo
		Beroperasiny a Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara.	Beroperasiny a Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provsu.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provsu.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provsu.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provsu.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provsu.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provsu.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provsu.	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)Region al Sumatera Utara menjadi kewenangan Dinas Kominfo Provsu.

G. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

MASYARAKAT

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, dirasa perlu melakukan perubahan terhadap perkiraan yang telah disusun, hal ini dikarenakan perlunya kegiatan prioritas yang akan mewujudkan visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

H. 1. Isu Strategis Nasional

Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- c. *Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.*

E. 2. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu strategis Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan berdasarkan 9 (Sembilan) prioritas pembangunan, yaitu:

- *Prioritas 1 : Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*
- *Prioritas 2 : Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan*
- *Prioritas 3 : Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan*
- *Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Mendukung Daya Saing Perekonomian*
- *Prioritas 5: Peningkatan produksi, produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan*
- *Prioritas 6 : Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas daerah*
- *Prioritas 7 : Peningkatan Ekonomi Kerakyatan*
- *Prioritas 8 : Perluasan Kesempatan kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin*
- *Prioritas 9 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah*

Sementara untuk Biro di Sekretariat, indikasi permasalahan yang ada adalah belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada birokrasi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Pembangunan Nasional untuk Tahun 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sementara itu, 9 Agenda Prioritas – NawaCita adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh Ke-Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 (RPJMD Provsu 2013-2018) mempunyai pilar pembangunan sebagai berikut:

1. *Good Govarnance and Clean Government*, melalui:
 - Pengelolaan tata pemerintahan yang baik
 - Peningkatan pendapatan daerah
 - Peningkatan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat
 - Peningkatan daya saing SDM
 - Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan
2. Membangun SDM yang berintegritas dalam bernegara, religious dan berkompotensi tinggi, diperoleh melalui:
 - Mendorong dinamika kehidupan bernegara dan berbudaya yang ditandai denngan nilai hokum
 - Peningkatan kualitas, kuantitas dan kapaitas sarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Pembangunan kualitas infrastruktur daerah, diperoleh melalui:
 - Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan pertumbuhan kawasan

- Peningkatan fungsi kegiatan pengembangan kewilayahan dan rawan bencana
4. Peningkatan kualitas standar hidup layak serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, diperoleh melalui:
- Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan social ekonomi
 - Peningkatan peran gender dan hak anak dalam pembangunan
5. Pengembangan ekonomi daerah melalui pengelolaan SDA dan berwawasan lingkungan, melalui:
- Menggerakkan sentra ekonomi kerakyatan
 - Optimalisasi pemanfaatan SDA yang memperhatikan kelestarian lingkungan
 - Revitalisasi SDM penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
 - Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana pertanian
 - Peningkatan produksi sektor pertanian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera, bahwa Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU sebagai unsur Staf Sekretariat yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu yang mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bahwa Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan tugas sebagai berikut :

“Membantu Menyusun Konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pembinaan Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengendalian Urusan Pemerintahan dan atau Kewenangan Otonomi Provinsi dibidang Administrasi Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, Bina Usaha Jasa dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan”.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan Mengkoordinasikan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Usaha Jasa dan Evaluasi Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
- b. Menyelenggarakan Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

dibidang Pelaporan, Usaha Jasa dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah.

Untuk menggambarkan identitas masa depan yang didambakan, maka dirumuskan visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan sebagai berikut:

Visi Biro Administrasi Pembangunan adalah “Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel”

Misi Biro Administrasi Pembangunan adalah :

- c. Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel dan Transparan melalui koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.*
- d. Mewujudkan Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menginformasikan serta mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah di dalam maupun luar negeri sebagai upaya pembinaannya.*

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu memiliki tujuan sebagai berikut:

3. Mewujudkan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan dan Hasil-Hasil Pembangunan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
4. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pada point 1 tersebut di atas adalah mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran:

- 1.3. Terkoordinirnya dan Terefasilitasinya Instansi terkait Pemprovsu dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri
- 1.4. Terhimpun dan Terevaluasinya Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
 - 4.1 Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
 - 4.2 Terlaksananya petunjuk teknis pelaksanaan APBD Pemprovsu

4.3 Terlaksananya proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4.4 Terbinanya Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kab/Kota

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antara lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dengan Indikator Sasaran:

1.1.3. Terkoordinirnya Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mengikuti pelaksanaan Pameran di dalam maupun di luar negeri yang meliputi Pameran, Hasil Pembangunan, Industri, Perdagangan, Kerajinan, Pariwisata, Budaya, Pertanian/Agro serta Potensi Investasi.

1.1.4. Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan

1.1.5. Adanya kelancaran pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan APBD Pemprov

1.1.6. Tersusunnya petunjuk teknis pelaksanaan APBD Pemprov

2.1.1. Adanya pembinaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah

2.1.2. Terlaksananya pembinaan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kab/Kota.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- d. Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi kepada efisien dan efektifitas.
- e. Mendorong timbulnya prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pola partisipasi dan berkelanjutan.
- f. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU, sesuai dengan RPJMD ProvSU Tahun 2014-2018, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU menyelenggarakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program

Program Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu yang akan dicapai pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

2. Kegiatan

Dari berbagai Program di atas, akan diselenggarakan berbagai rencana kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu sesuai dengan pendanaan yang diperoleh setiap tahunnya.

Adapun Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1	2	3
1.20 1.20.03	Urusan Wajib Sekretariat Daerah	
1.20.03.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.20.03.01.02	Penyediaan Jasa	Output : Terlaksananya

	Administrasi Keuangan	kelancaran tugas administrasi dan Keuangan Terbantunya kelancaran tugas Outcome : administrasi dan Keuangan
1.20.03.06.06	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kerja (PK) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu	Terlaksananya Penyusunan Laporan Output : Kinerja dan Perjanjian Kerja Biro Adm, Pembangunan Outcome : Tersusunnya LK dan PK Biro Adm. Pembangunan
1.20.03.06.08	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu	Terlaksananya Penyusunan RKA dan Output : DPA Outcome : Tersusunnya RKA dan DPA Biro Adm. Pembangunan
1.20.03.05.33	Penyelenggaraan Tata Usaha Perkantoran, Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi	Terlaksananya tata usaha Output : perkantoran, kearsipan perpustakaan dan dokumentasi Outcome : Terselenggaranya tata usaha perkantoran, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi
1.20.03.01.03	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Komputer di Biro Output : Adm. Pembangunan Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana

		kantor
1.20.03.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Outcome : Terlaksananya keperluan Alat Tulis Kantor
1.20.03.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya Barang Cetak Outcome : Terlaksananya Program Kegiatan Perkantoran
1.20.03.02.48	Belanja Surat Kabar dan Majalah	Output : Tersedianya surat kabar dan majalah Outcome : Terlaksananya keperluan perkantoran
1.20.03.01.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Outcome : Terlaksananya rapat-rapat dengan Dinas/Instansi Terkait
1.20.03.01.07	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Outcome : Meningkatkan Koordinasi Kerja Ke Luar Daerah
1.20.03.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1.20.03.33.23	Penyelenggaraan informasi elektronik melalui Website Biro Administrasi	Output : Terselenggaranya website Biro Adm. Pembangunan

	Pembangunan SetdaprovSU	SetdaprovSU sebagai sub domain website sumutprov.go.id <i>Outcome</i> : Terpenuhinya amanat Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan PemprovSU
1.20.03.10.03	Program Peningkatan disiplin aparatur	
1.20.03.10.,,	Outbound PNS Biro	<i>output</i> : outbound Terselenggaranya team work melalui <i>Outcome</i> : aparaturnya meningkatnya disiplin melalui team work
1.20.03.10.,,	Pembinaan Tim Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU	<i>Output</i> : Terbentuknya Tim PPID Pembantu di Biro Adm. Pembangunan SetdaprovSU <i>Outcome</i> : Terpenuhinya amanat Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1.20.03.10.,,	Pembinaan Tim Pejabat Unit Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (UP4) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu	<p><i>Output</i> : Terbentuknya Tim UP4 Pembantu di Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu</p> <p>Terpenuhinya amanat</p> <p><i>Outcome</i> : Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara</p>
1.20.03.10.,,	Studi Banding Unit Layanan Pengadaan dan peningkatan SDM ULP dan Pokja Provsu	<p><i>Output</i> : Terlaksananya studi banding untuk penguatan ULP Provsu</p> <p>meningkatnya SDM Pokja ULP dan Stakeholder tentang</p> <p><i>Outcome</i> : ketentuan pengadaan barang dan jasa</p>
1.20.03.10.04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1.20.03.10.01	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	<p><i>Output</i> : Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi, dsb dalam Rangka Peningkatan SDM Pejabat/Pegawai</p> <p>Terdidik dan Terlatihnya</p> <p><i>Outcome</i> : Pejabat/Pegawai Biro di Bidang Tugasnya serta memperoleh</p>

		informasi
	Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan	<p>Output : Terlaksananya Sosialisasi ULP bagi ASN Provsu</p> <p>Outcome : Terdidik dan Terlatihnya Pejabat/Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara</p>
1.20.03.10.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
1.20.03.10.,,	Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu	<p>Output : Buku Laporan Bulanan</p> <p>Outcome : Kegiatan APBD Provsu Tersedianya Buku Laporan Bulanan dan Pendataan Pelaksanaan Pelaporan Kegiatan APBD Provsu pada UPTD</p>
1.20.03.10.,,	Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/Kota Se-Sumatera Utara serta Monev Sismontep TEPRRA Provinsi Sumatera Utara	<p>Output : Rekapitulasi Aktivitas Pengadaan APBD SKPD Provsu dan Pemerintah Kab/Kota</p> <p>Outcome : Terdatanya Hasil Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan Kab/Kota oleh</p>

		Pejabat Penghubung TEPRA Provsu
1.20.03.10.,,	Kegiatan ULP dengan Pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya operasional layanan Output : pengadaan di Provsu Outcome : Terselenggaranya aktifitas pengadaan barang dan jasa di Provsu
1.20.03.10.,,	Pendokumentasian Hasil Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Terhimpunnya berbagai hasil Output : pembangunan yang telah dicapai oleh Provsu dalam bentuk dokumen/ audio visual/multimedia/ dan sebagainya. terdokumentasikannya berbagai hasil Outcome : pembangunan yang telah dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara.
1.20.03.10.06	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	
1.02.03.33.01	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprovsu beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Pavilun Pemprovsu mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara	Mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara Output : Sumatera Utara Outcome : Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Pekan Raya Sumatera
1.02.03.33.02	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi	Mengikuti Pesta Pulau Output : Pinang di Malaysia

	<p>Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Pavilun Pemprov su mengikuti Pesta P.Pinang-Malaysia</p>	<p>Outcome : Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Pesta Pulau Pinang</p>
1.02.03.33.04	<p>Pembinaan dan Dukungan kepada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprov su dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk</p> <p>Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprov su di Dalam dan Luar Negeri</p>	<p>Output : Memfasilitasi Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Instansi Terkait</p> <p>Pemprov su dalam Mengikuti Expo atau gelar produk Kerajinan di dalam dan luar negeri Terikutinya Expo dan Gelar Produk Kerajinan di dalam dan luar negeri oleh Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Mitra binaanya</p> <p>Outcome : dan luar negeri</p>
1.02.03.33.05	<p>Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Pavilun Pemprov su mengikuti Pekan Raya Jakarta</p>	<p>Output : Mengikuti Pekan Raya Jakarta</p> <p>Outcome : Terkoordinirnya Dinas/Instansi terkait serta mitra binaannya dalam Mengikuti Pekan Raya Jakarta</p>

1.20.03.33.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provsu	Output : pelaksanaan kegiatan APBD Povus Pedoman bagi SKPD Outcome : dalam menyusun RKS/DPA SKPD setiap tahun
1.20.03.33.13	Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada SKPD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Output : Laporan hasil pengendalian kegiatan Outcome : Pelaksanaan kegiatan APBD lebih efektif efisien, tepat mutu dan sasaran.
1.20.03.33.18	Pemberdayaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	output : Sosialisasi kepada Tim Pembina Jasa Outcome : Meningkatkan pemahaman para Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara
1.20.03.33.19	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	output : Pembinaan kepada penyelenggaraan jasa konstruksi Outcome : Meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan jasa konstruksi
1.20.03.33.,,	Pengelolaan Program Perumahan Kawasan	output : Pembentukan dan penetapan Sekretariat

	Permukiman		<p>Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Terciptanya lingkungan kawasan</p> <p>Outcome : permukiman yang sesuai dengan Nawacita Presiden RI agar terbayar 1 juta rumah melalui advokasi, perencanaan sinergitas komprehensif dan terintegrasi</p>
1.20.03.33.,,	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Non Konstruksi	<p>output : Pembinaan kepada penyelenggaraan Jasa Non Konstruksi</p> <p>Outcome : Meningkatkan pemahaman tentang penyelenggaraan Jasa Non Konstruksi</p>	
1.20.03.33.24	Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provsu	<p>output : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi Sumut</p> <p>Outcome : Terciptanya lingkungan kondusif yang dapat mendukung terciptanya PPSP melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi</p>	
1.20.03.10.,,	Bimtek Penyusunan Dokumen Pengadaan, Penyusunan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan	<p>Output : Terlaksananya Bimtek bagi Pokja dan Pengguna ULP Provsu, Kab/Kota</p>	

	Rancangan Kontrak bagi Pokja dan Pengguna ULP Provinsi, Kab/Kota	Terdidik dan Terlatihnya Pejabat/Pegawai ASN di Prov, dan Outcome : Kab/.Kota
1.20.03.10.,,	Penyusunan Standarisasi Pelayanan ULP	Terhimpunnya standarisasi dalam Output : pembuatan dokumen pengadaan Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Outcome : (SOP)
1.20.03.10.,,	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pokja ULP	terpantaunya standar pelayanan minimal Output : ULP implementasi SOP Outcome : ULP
1.20.03.10.,,	Rakor ULP Provinsi dengan ULP Kabupaten/ Kota	terselenggaranya Output : Rakor ULP Terjalannya sinkronisasi program Outcome : dan kegiatan antara ULP Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja TA. 2017 dan analisis kinerja kegiatan serta analisis pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu baik dilihat dari segi pencapaian kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran berhasil dengan baik, walaupun dikarenakan efisiensi anggaran berimbas kepada berkurangnya kegiatan. Walaupun demikian, kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi Biro dapat berjalan optimal dan realisasi memuaskan, karena masing-masing kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang diprogramkan dan telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan pada Renja 2019 ini merupakan keseluruhan program yang mengacu kepada RPJMD Pemprovsu untuk urusan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu. Begitupun tidak keseluruhan kegiatan dapat diwujudkan setiap tahunnya mengacu kepada kegiatan prioritas dan mencegah tumpang tindihnya kegiatan dengan tupoksi SKPD / Unit Kerja lainnya, disamping itu mungkin disebabkan faktor pagu anggaran.

Melalui Renja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu TA. 2019 ini juga diharapkan dapat memajukan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, baik dari segi administrasi pelaksanaan pembangunan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan serta berlangsungnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas transparansi, persaingan sehat

dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Medan, 2018

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU**

**Ir. ERIC ARUAN, MM
NIP. 19660309 199603 1 003**

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

BAB	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM	7
C. MAKSUD DAN TUJUAN	9
D. SISTEMATIKA PENULISAN	9
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	 10
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012.....	10
B. CAPAIAN KINERJA	14
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI	26
D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	27
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	31
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	 33
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	33
B. TUJUAN DAN SASARAN	36
C. PROGRAM DAN KEGIATAN	38
 IV. PENUTUP	 46

LAMPIRAN :

- i. *Realisasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu TA.2017*
- ii. *RKPD Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu TA. 2019*